

## **BAB I : Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Penelitian ini difokuskan pada isu industri *fast fashion* yang, dianggap telah melanggar hak-hak asasi manusia khususnya para pekerja buruh di negara berkembang. Yaitu di negara Kamboja, di mana sebagian besar kontribusi terhadap GDP berasal dari ekspor garmen. Banyak isu yang menyangkut para pekerja buruh di negara Kamboja, yang seringkali tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja atau hak asasi manusia (Arnold, 2021). Dalam penelitian ini, ada tiga aktor yang akan dibahas, yaitu negara Kamboja, Hennes & Mauritz sebagai perusahaan mode *multinational corporations* yang memiliki peran besar dalam industri garmen di Kamboja, dan *International Labour Organization* sebagai organisasi hukum yang berfokus pada hak-hak pekerja buruh di seluruh dunia. Dimana ketiga faktor tersebut berperan dan berusaha memperbaiki kesejahteraan pekerja buruh di negara Kamboja yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Saat ini industri bisnis global sudah sangat berkembang sangat pesat, bahkan bukan hanya satu industri yang mengalami perkembangan saja tetapi *industry fashion* juga. *fast fashion* adalah hasil produk pakaian yang ekonomis, diproduksi dengan biaya rendah, dan mengikuti mode yang mirip dengan pakaian mahal, bergantung pada tren dan musim. Salah satu contohnya adalah pakaian yang diperjual belikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional seperti Uniqlo, H&M, Forever 21, bahkan wartawan di Amerika membandingkan harga Mcnugget di Amerika dalam satu porsi adalah 6.69 dollar Amerika sedangkan satu potong pakaian yang dijual oleh H&M saja adalah 4.95 dollar. Hal ini menunjukkan bahwa apabila seorang mengkonsumsi Mcnugget dalam seminggu, maka kemungkinan orang tersebut bisa mendapatkan 8 potong pakaian H&M. Tingginya permintaan dari konsumen terhadap *fast fashion* telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk menggunakan rantai pasokan global, yang merupakan sistem di mana perusahaan mengurangi biaya produksi secara besar-besaran dengan cara menempatkan fasilitas produksi melalui pihak ketiga di negara-negara berkembang, guna mencapai target penjualan dan memperoleh keuntungan yang maksimal (Fairhurst, 2010 ).

Sistem rantai pasokan global atau *global supply chain* adalah salah satu faktor yang berdampak pada terciptanya situasi kerja yang menimbulkan kontroversi

dalam industri *fast fashion*. Situasi kerja yang menimbulkan kontroversi ini mencakup pelanggaran hak-hak dasar pekerja di berbagai bidang, seperti upah, jam kerja, hak perlindungan keselamatan kerja, dan hak akses pelayanan kesehatan.

Disisi lain biasanya industri *fast fashion* di negara-negara berkembang, membuat manajemen perusahaan memaksa para pekerja untuk mencapai target pemesanan tanpa memperhatikan keadaan para pekerja. Jam kerja yang lama menyebabkan para pekerja tidak memiliki kesehatan yang baik dan mudah merasa lelah. Hal ini biasanya diperparah dengan tidak adanya departemen sumber daya manusia (*human resources department*) yang tidak ada di beberapa pabrik atau perusahaan *fast fashion* di negara-negara tersebut. Hal ini menyebabkan para pekerja tidak bisa mengajukan keluhan atau melaporkan pelanggaran hak yang mereka alami dalam pekerjaan.

Permintaan pasar yang tinggi terhadap produk garmen *fast fashion* mendorong produsen untuk memproduksi dalam jumlah yang banyak dan cepat, yang menyebabkan permintaan bahan seperti kapas untuk pemintalan sangat tinggi. Dengan tingginya produksi kapas yang sangat besar, mendorong produsen menggunakan bahan kimia seperti pestisida dengan jumlah yang besar untuk mempercepat proses pertumbuhan. Tidak jarang juga para produsen mengganti kapas dengan bahan yang tidak ramah lingkungan, seperti poliester dan tekstil sintetis. Bahan-bahan ini berasal dari minyak, yang apabila dicampurkan dengan pestisida, dapat melepaskan racun dan logam berat yang berdampak kepada kesehatan pekerja, penduduk di sekitar pabrik, dan juga lingkungan.

Dengan perlindungan hak pekerja yang minim serta tanpa jaminan hak keselamatan dan kesehatan para pekerja, industri ini sangat rentan terpapar zat berbahaya dari poliester serat tekstil sintetis. Sehingga banyak laporan dari para pekerja industri *fast fashion* mengidap kondisi penyakit seperti kanker, gangguan pernafasan, kerusakan fungsi endokrin, dan bahkan banyak pekerja wanita yang hamil dan janinnya mengalami perkembangan yang gagal, bahkan hingga kematian pada ibu dan janin.

Kamboja adalah salah satu negara yang berpartisipasi dalam perputaran *global supply chain fast fashion*. Kamboja menjadi target karena keahlian terkenal negara tersebut dalam industri garmen serta ketersediaan tenaga kerja murah dengan jumlah yang sangat banyak. Industri garmen banyak berkontribusi kepada ekonomi Kamboja saat pertama kali didirikan pada tahun 1994. Dengan persaingan dan perubahan mode yang sangat cepat, hal ini mendorong perusahaan *fast fashion* industry seperti *Hennes & Mauritz* (H&M) untuk memproduksi garmen di Kamboja. Pada tahun 2015, menurut *Clean Clothes Campaign*, jumlah pekerja di negara Kamboja pada tahun 2014 mencapai 400.000 sampai 650.000, di mana industri ini berkontribusi mencapai 16% dari GDP negara Kamboja. Bahkan pada akhir tahun 2013, dikatakan bahwa nilai ekspor Kamboja dalam industri garmen

sebesar 80%, atau setara dengan nilai US\$5,53 miliar. Sedangkan pada tahun 2018, pendapatan ekspor mendapatkan 73%, yang mana telah mempekerjakan lebih dari 650.000 orang di Kamboja dimana pada saat itu total penduduk Kamboja adalah 15,83 juta jiwa. Pekerja buruh pada tahun 2018 tersebut didominasi oleh perempuan. Tujuan utama dari para pekerja garmen tersebut adalah untuk menafkahi diri mereka sendiri dan juga membantu perekonomian keluarga (memastikan kesejahteraan pendidikan dan kesehatan menjadi lebih baik untuk anggota keluarga mereka). Satu orang pekerja biasanya membiayai 3-4 anggota keluarga (strategies).

Pada tahun 2013, dikatakan bahwa upah minimum para pekerja buruh garmen hanya sebesar \$80 per bulan dengan jam kerja 12 jam per hari. Penetapan upah minimum dan jam kerja ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Kamboja, yang didasarkan pada hukum ketenagakerjaan tahun 1997 yang diatur dalam Konstitusi Kerajaan Kamboja 1993. Dijelaskan pada Pasal 104 bahwa upah harus setidaknya sama dengan upah minimum yang dijamin; pemerintah harus memastikan bahwa setiap pekerja memiliki standar hidup yang layak sesuai dengan martabat manusia.

Banyak juga kawasan industri *fast fashion* di Kamboja tidak difasilitasi dengan prosedur keamanan bangunan yang sesuai dengan standar perusahaan, di mana hal ini berhubungan dengan jaminan keselamatan pekerja. Bahkan pada tahun 2019, terjadi kecelakaan pekerja yang menyebabkan 24 orang meninggal dunia. Para pekerja tersebut terjebak di bawah puing-puing dan akhirnya harus merenggut nyawa. Hal ini bahkan menjadi perhatian dari negara China sebagai partner negara Kamboja (Debora, 2019) .

*International Labor Organization* (ILO) merupakan lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki wewenang untuk menangani isu-isu hak pekerja dan bertanggung jawab mengendalikan permasalahan yang ada. Sebagai organisasi perlindungan bagi para pekerja buruh, ILO memiliki visi dan misi untuk mengakui hak-hak pekerja di tempat kerja, mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak, dan meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog terkait masalah-masalah pekerjaan.

Pada tahun 2001, ILO telah menjalin kerja sama dengan negara Kamboja dengan melihat industri garmen di Kamboja menjadi salah satu penopang ekonomi negara tersebut. Salah satu program ILO yang masih berjalan di negara

Kamboja saat ini adalah *Better Factories Cambodia*, dimana pemerintah Kamboja dan ILO membuat kebijakan agar perusahaan garmen di Kamboja dapat meningkatkan kondisi kerja bagi pekerjanya yang lebih baik. Hal ini dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MOU)* yang harus ditandatangani oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

H&M, sebagai peritel pakaian terbesar kedua di tingkat global pada tahun 2016, menjadikan Kamboja sebagai salah satu sumber utama pasokan pakaian mereka. H&M bekerja sama dengan lebih dari 100 pabrik di Kamboja untuk memproduksi pakaian mereka. Meskipun mereka bekerja sama secara langsung dengan pabrik-pabrik yang terdapat di Kamboja, mereka mengetahui bahwa banyak pabrik yang belum memenuhi standar keselamatan Kamboja. Selain itu, H&M juga dituduh membayar upah minimum di Kamboja kepada para pekerjanya. Namun, pada tahun 2013, H&M membuat suatu inisiatif untuk mendorong terwujudnya adanya kelayakan upah minimum dengan kebijakan *Fair Living Wage Strategy*. Walaupun kebijakan ini baru diimplementasikan pada tahun 2018 untuk meningkatkan sistem manajemen upah bagi para pekerjanya dan menjamin terciptanya lingkungan demokratis di kawasan pabrik H&M. (initiative, 2018)

Pada tahun 2014, H&M menyatakan komitmen untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan para pekerjanya dengan bekerja sama dengan ILO. Kerjasama ini terjadi karena masalah dalam industri *fast fashion*, terutama dalam rantai pasokan, dimana banyak produksi dilakukan di negara-negara ketiga tanpa transparansi yang cukup baik dari peritel seperti H&M atau perusahaan pihak ketiga yang berperan sebagai produsen pemasok.

Dengan bekerja sama, ILO berharap dapat mengambil tindakan yang mendukung pembentukan hubungan industrial yang efektif dan meningkatkan penghargaan terhadap standar tenaga kerja global. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk membentuk kolaborasi yang strategis dan komprehensif dengan perusahaan-perusahaan berpengalaman di bidang ini, guna mempermudah pengawasan sistematis dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Kerjasama strategis antara H&M dan ILO bertujuan mendorong perlindungan hak-hak pekerja dan menjaga kelangsungan produksi dalam rantai pasokan pakaian di Kamboja dan negara-negara lain di seluruh dunia. Kegiatan ini tidak terbatas pada Kamboja saja,

melainkan juga melibatkan negara-negara lain di tingkat global dan nasional. Kolaborasi ini juga bertujuan untuk menjadi contoh positif bagi perusahaan lain dan pihak-pihak terkait serta membentuk aliansi global untuk mempromosikan isu pemenuhan hak pekerja *fast fashion* di Kamboja.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada kerjasama H&M dan ILO dalam menanggulangi isu kesejahteraan pekerja di Kamboja. Berdasarkan pemaparan latar belakang, muncul ketertarikan untuk meneliti: ***“Kerjasama Hennes & Mauritz (H&M) Serta International Labour Organization Dalam Memenuhi Hak Pekerja di Kamboja Dalam Industri fast fashion.”***

### **B. Rumusan Masalah**

“Bagaimana kerjasama yang dilakukan H&M bersama International Labor Organization (ILO) dalam meningkatkan hak pekerja *fast fashion* di Kamboja?”

### **C. Kerangka Berpikir**

Untuk merespons pertanyaan penelitian yang diajukan tentang bagaimana H&M serta ILO bekerja sama dalam memastikan pemenuhan hak pekerja dalam industri *fast fashion* di Kamboja, analisis dapat dilakukan dengan menerapkan konsep Transnational Advocacy Network (TAN).

Latar belakang penulis mengambil kerangka konsep *Transnational Advocacy Network* atau TAN karena penulis melihat bahwa ada nya keterhubungan antara kerangka berpikir ini dengan beberapa faktor seperti aktor yang dijelaskan dalam kerangka ini tidak terbatas hanya kepada negara saja, tetapi lebih condong menjelaskan bahwa aktor hubungan internasional bisa lebih melibatkan organisasi internasional, Perusahaan multinasional, maupun lainnya. Disisi lain konsep TAN ini sendiri tidak hanya berfokus kepada isu-isu *hard diplomacy* seperti politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain tetapi menggaris bawahi bahwa isu-isu seperti *soft diplomacy* seperti lingkungan, budaya, hak asasi manusia menjadi sangat penting.

Konsep jaringan advokasi transnasional (TAN) yang ditemukan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink dapat didefinisikan sebagai jaringan yang terbentuk

melalui komunikasi sukarela dan timbal balik antara berbagai pihak yang memiliki komitmen dan keahlian dalam suatu isu tertentu. Dalam konsep jaringanadvokasi transnasional, kelompok advokasi merujuk kepada aktor non- pemerintah yang beroperasi lintas negara, termasuk organisasi non-pemerintah, organisasi internasional non-pemerintah, media, aktivis, akademisi, dan perusahaan multinasional. Mereka bekerja sama untuk mewakili kepentingan publik secara luas dalam isu tertentu (Sikkink) .

Jaringan advokasi transnasional melibatkan berbagai macam aktor, baik kelompok maupun individu, dari berbagai macam negara untuk bekerja sama dan mencapai tujuan yang telah disepakati. Konsep ini dianggap mengatasi berbagai macam batasan nasional dan berkolaborasi melintasi perbatasan negara. Biasanya isu yang diangkat dalam konsep ini berhubungan dengan hak asasi manusia, perdagangan internasional, perubahan iklim, dan juga isu-isu kesehatan global. Kerjasama yang dilakukan dalam konsep jaringan advokasi transnasional seringkali melibatkan berbagai macam jenis organisasi seperti LSM, kelompok pendukung hak asasi manusia, organisasi non-pemerintah, individu, dan bahkan perusahaan swasta serta multinasional yang memiliki kepentingan dalam isu-isu tersebut. Konsep jaringan advokasi transnasional memiliki tujuan utama, yaitu mempengaruhi kebijakan di suatu negara, organisasi internasional, dan bahkan sektor swasta untuk lebih mempromosikan perubahan positif dalam isu-isu lingkungan global. Pada umumnya, strategi yang digunakan adalah kampanye, riset, advokasi, dan diplomasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Biasanya aktor dalam konsep jaringan advokasi transnasional memiliki pengaruh dalam keputusan yang diambil oleh organisasi internasional seperti PBB atau dalam perjanjian internasional.

Setelah dijelaskan diatas kita bisa mengetahui bahwa isu yang dibahas dalam penelitian ini yaitu “Kerjasama *Hennes & Mauritz (H&M)* Dengan *International Labour Organization* Dalam Memenuhi Hak Pekerja di Kamboja Dalam Industri fast fashion” bisa dengan tepat dijelaskan dalam konsep *Transnational Advocacy Network*. Dilihat dari aktor yang dijelaskan dalam TAN bahwa negara bukan menjadi satu-satunya aktor penting dalam kontribusi hubungan internasional, tetapi adanya aktor non negara seperti organisasi nasional yang mana dalam isu ini diwakili oleh *International Labour Organization*, dan juga perusahaan

multinasional yang mana diwakili oleh *Hennes & Mauritz* atau yang dikenal dengan sebutan H&M. Disisi lain isu yang di highlight dalam TAN sendiri adalah isu-isu *soft diplomacy* seperti hak asasi manusia, sama halnya dengan isu yang akan dijelaskan dalam penelitian ini yaitu kesejahteraan para pekerja buruh di Kamboja. Dimana kesejahteraan ini erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Tujuan yang ingin dicapai oleh para aktor bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi ataupun tujuan utama mereka melakukan kerjasama, karena dalam TAN sendiri dijelaskan bahwa tujuan adanya hubungan para aktor ini karena adanya rasa tanggung jawab antara para aktor untuk berkontribusi dalam suatu isu, yang mana isu dalam penelitian ini adalah kesejahteraan pekerja buruh di Kamboja. Dimana sebenarnya hal ini adalah kepentingan negara, pemerintah, dan juga masyarakat di suatu negara.

Tapi dalam konsep kerangka ini tujuan utama dari ILO dan H&M melakukan kerjasama tentunya memiliki tujuan utama yaitu bagaimana akhirnya kerjasama yang dilakukan oleh kedua faktor tersebut bisa mempengaruhi kebijakan atau menyebabkan aktor utama di negara Kamboja yaitu adalah pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerja buruh di Kamboja. Sama halnya yang dijelaskan dalam konsep TAN bahwa tujuan utama para aktor sendiri adalah untuk bisa mempengaruhi bagaimana para aktor bisa mempengaruhi kebijakan suatu negara. Jadi melalui konsep TAN (*Transnational Advocacy Network*) ILO dan H&M sebagai aktor dan negara diharapkan dapat ikut mempengaruhi kebijakan di suatu negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya para memerlukan sebuah strategi yang di cocok untuk bisa mencapai tujuannya, yang dijelaskan oleh E. Keck dan Kathryn Sikkink, TAN menggunakan berbagai taktik untuk mencapai tujuan infiltrasi nilai dan tujuan mereka dalam suatu target yang ditentukan. Secara umum, taktik ini mencakup pertukaran informasi, peningkatan eksposur publik, dan upaya untuk memperluas akses ke institusi-institusi politik resmi. E. Keck dan Kathryn Sikkink juga merinci strategi yang digunakan untuk mempengaruhi proses dan aturan institusi, mengubah posisi aktor-aktor tertentu, dan mempengaruhi perilaku negara dalam kerangka kerja TAN.

Strategi-strategi ini melibatkan Langkah Langkah berikut:

- a. *Information Politics* mencakup keahlian aktor untuk mengkomunikasikan informasi yang dihasilkan melalui analisis dan penelitian sebagai alat dalam upaya advokasi dan kampanye tersebut. Media massa adalah pendukung yang krusial dalam *Information Politics* karena mereka menjadi platform penting untuk menyebarkan hasil analisis dan data riset yang dimiliki oleh jaringan advokasi.
- b. *Symbolic Politics* melibatkan kemampuan untuk menggambarkan simbol, tindakan, atau cerita dengan maksud menarik perhatian masyarakat umum. Penafsiran simbolik adalah bagian kunci dari upaya persuasi yang memungkinkan jaringan advokasi untuk menciptakan kesadaran dan meningkatkan pemahaman terkait isu yang sedang mereka dorong.
- c. *Leverage Politics* adalah kemampuan untuk memanfaatkan aktor-aktor yang memiliki posisi yang lebih kuat dalam struktur kekuasaan untuk mencapai target tertentu. Ini sering dilakukan ketika anggota jaringan memiliki posisi yang lebih lemah dan pengaruh yang terbatas. Perubahan dalam kebijakan kemungkinan lebih mungkin terjadi ketika ada tekanan dan bujukan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan yang lebih besar.
- d. *Accountability Politics* adalah usaha untuk memastikan bahwa pihak yang memiliki kekuatan lebih tetap mematuhi prinsip-prinsip kebijakan yang telah ditentukan.

Dari penjelasan strategi yang dituliskan dalam konsep TAN ini penulis merasa ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh penulis dalam menjelaskan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. *Information Politics*  
Dalam politik ini ada sebuah strategi yang digunakan oleh ILO dan juga H&M dimana mereka menggunakan media tradisional dan non tradisional untuk bisa menginformasikan tujuan mereka khususnya di kawasan Kamboja.
- b. *Symbolic Politics*  
Strategi ini digunakan oleh ILO dan H&M ini dengan memunculkan atau dipicu suatu kejadian yang menyebabkan perhatian negara dan pemerintah Kamboja kepada isu kesejahteraan pekerja buruh *fast fashion* ini.
- c. *Leverage Politics*



Politik ini condong erat nya dengan dampak yang terjadi setelah ILO dan H&M melakukan kerjasama. Dari banyak nya kerjasama H&M dan ILO di Kamboja akhirnya banyak nya dampak positif yang dirasakan oleh para pekerja buruh di Kamboja.

Pada pelanggaran hak asasi pekerja di industri *fast fashion* yang terjadi di negara kamboja merupakan salah satu kasus hukum yang tidak dapat lagi ditolerir. Sehingga Kerjasama yang dilakukan H&M dengan ILO adalah suatu aktivitas jejaring advokasi untuk mengupayakan pemenuhan hak pekerja di negara kamboja. Dalam upaya tersebut, H&M dan ILO menggunakan empat strategi jaringan advokasi transnasional. Empat strategi tersebut adalah *Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politic, Accountability Politics*. Penjelasan singkat mengenai konsep jaringan advokasi transnasional ini akan diberikan pada Bab 3 penelitian ini untuk menjelaskan kerjasama H&M dan ILO dalam upaya pemenuhan hak asasi pekerja *fast fashion* di negara Kamboja. Konsep ini didasarkan pada konsep informasi politik, politik simbolik, serta strategi politik yang memiliki pengaruh terhadap strategi yang digunakan oleh mereka yang dijelaskan oleh E. Keck and Sikkink.

#### **D. Hipotesa.**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir yang dijelaskan di atas kerjasama yang dilakukan H&M dan *Internasional Labour Organization* adalah:

1. *Leverage Politic and Accountability Politics* dalam Kerjasama Sukarela dan Saling Menguntungkan adalah:

Untuk membantu menangani isu pekerja buruh di Kamboja, yang mencakup tanggung jawab publik dan pengawasan oleh ILO, serta *Leverage Politic* yang dimiliki sebagai bagian dari United Nations, memungkinkan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan pekerja buruh di Kamboja.

2. Implementasi Kebijakan melalui *Strategi Information Politics, Symbolic Politics, and Leverage Politics* yaitu:

a. Strategi *Information Politics*: Penggunaan media massa, baik tradisional

maupun nontradisional (poster, majalah, berita online, website perusahaan, dll.), untuk menyebarkan informasi tentang kondisi pekerja buruh dan upaya perbaikan yang dilakukan.

- b. Strategi *Symbolic Politics*: Penggunaan simbolisasi isu pekerja buruh di Kamboja melalui peristiwa tertentu yang memicu dorongan untuk kebijakan peningkatan hak pekerja buruh.
- c. Strategi *Lverage Politics*: Pengaruh ILO sebagai organisasi resmi *United Nations* untuk mendorong kebijakan yang terkait dengan pekerja buruh di Kamboja, memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan dan dipatuhi oleh semua pihak terkait.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelajahi usaha yang dilakukan oleh organisasi transnasional dan Perusahaan dalam mengatasi permasalahan di negara kamboja. Pada penelitian ini akan melibatkan deskripsi, analisis, dan korelasi terhadap sejumlah variabel yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti dan unit penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh dari sumber sumber yang tertulis seperti laporan resmi seperti laporan dari pihak ILO dan H&M, berita baik dari jurnalis Internasional ataupun Nasional, jurnal dan buku yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

Penulis juga akan menjelaskan fakta secara apa adanya yang mana akan dipilih secara terorganisir dan diinterpretasi untuk bisa menjawab rumusan masalah yang di sebutkan di atas.

### **F. Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas isu hak pekerja di negara Kamboja, bisnis *fast fashion* di negara Kamboja, beroperasinya bisnis H&M di Kamboja, dan juga strategi yang dilakukan H&M dan ILO di negara Kamboja. Sumber dalam penelitian ini dibatasi dalam rentang tahun 2017-2020, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sumber penelitian ini di luar rentang

tahun yang ditentukan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Pentingnya penyajian hasil penelitian dengan cara yang terstruktur adalah suatu persyaratan penting dalam norma penulisan penelitian, karena kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada cara penyajian tersebut. Struktur penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu:

**BAB I:** Dalam Bab I ini akan dijelaskan mengenai bagaimana latar belakang inisiasi Kerjasama H&M dan ILO untuk bisa memenuhi hak pekerja di kamboja dalam industri *fast fashion*. Dalam fenomena *fast fashion* di era global ini banyak ahli lingkungan dan kemanusiaan menilai isu ini sudah melanggar hak asasi manusia. Salah satu pelanggaran yang menjadi topik utama adalah bagaimana industri *fast fashion* menjadi permintaan yang tinggi dari konsumen tetapi dari sisi pekerja buruh tidak mendapatkan hak yang pantas dan diskriminasi pekerja, seperti halnya yang terjadi di kamboja dalam satu bulan rata rata upah pekerja buruh hanya senilai 80\$ amerika. Hal ini menyebabkan banyaknya tuntutan kepada aktor aktor dalam hubungan internasional seperti organisasi internasional yaitu ILO dan atau Perusahaan multinasional seperti H&M memiliki kewajiban publik dalam membantu menangani isu tersebut. Dalam landasan penelitian ini menggunakan kerangka berpikir *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang di rasa sesuai jadi landasan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif jangkauan penelitian ini dari 2013 sampai 2020.

**BAB II:** Pada Bab II ini akan dijelaskan bagaimana kedua aktor memiliki kontribusi dalam isu hak pekerja buruh dalam industri *fast fashion*. Dimulai dari bagaimana perkembangan industri *fast fashion* dalam era globalisasi, yang membuat menjadi sangat penting saat ini. Selanjutnya akan dibahas juga bagaimana hubungan antara industri *fast fashion* yang saat ini ternyata bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana hal ini menunjukkan walaupun isu ini bersifat *soft* diplomasi tetapi ternyata isu ini bisa mempengaruhi isu hard diplomasi. Setelah itu akan dibahas juga mengenai dampak industri *fast fashion*, dimana dampak ini ternyata tanpa disadari mempengaruhi seperti isu hak

asasi manusia, lingkungan, dan kestabilan *supply chain* di dunia internasional. Selanjutnya akan dibahas juga bagaimana industri *fast fashion* ini mempengaruhi isu-isu kemanusiaan yang lebih detailnya kepada hak asasi buruh dalam industri *fastfashion*. Selaku organisasi internasional dalam bidang hak asasi pekerja buruh, juga akan dijelaskan bagaimana *International Labour Organization* dalam isu hakasasi pekerja buruh industri *fast fashion*. Selaku perusahaan multinasional juga H&M memiliki andil dan tanggung jawab juga dalam industri *fast fashion* ini, yangmana akan dijelaskan bagaimana H&M bisa terjun dalam industri *fast fashion*.

**BAB III:** Pada Bab utama ini akan di bahas Kerjasama apa saja yang dilakukan oleh ILO dan H&M dalam mengupayakan hak pekerja industri *fast fashion* di kamboja. Kerjasama yang dilakukan ILO dan H&M bukan hanya terpaku pada suatu program tapi ada beberapa program yang dilakukan oleh ILO dan H&M untuk mendorong pemenuhan hak pekerja di industri *fast fashion* di kamboja. Dijelaskan juga bagaimana ILO dan H&M membuat strategi pendekatan dalam *Strategi Information Politics, Symbolic Politics, and Lverage Politics* Kerjasama yang sesuai dengan kerangka pemikiran *Transnational Advocacy Network*.

**BAB IV:** Menjelaskan mengenai kesimpulan bagaimana Kerjasama yang dilakukan oleh ILO dan H&M dalam mendorong kesejahteraan para pekerja buruh industri *fast fashion* di kamboja.